

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sedangkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembangunan di segala bidang baik itu pembangunan secara fisik maupun secara psikis. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya usaha-usaha kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tanpa landasan, tujuan dan arah yang jelas tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu di samping kemampuan aparat pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dari pembangunan itu diperlukan juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mensukseskan pembangunan itu.

Berdasarkan telaah terhadap hal-hal yang terjadi selama ini bahwa pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap. Hal ini adalah cerminan pernyataan kehendak rakyat untuk memberikan arah bagi pembangunan Nasional. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan sektoral dan pembangunan daerah

serta dilaksanakan secara terpadu dan saling isi mengisi.

Pada hakekatnya fungsi dan peranan Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama dalam rangka membangun masyarakat, bagi setiap negara tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada beberapa hal pokok antara lain :

“ Pertama adalah falsafah hidup k masyarakatan dan kedua adalah falsafah politik masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan pemerintah dan juga seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dibidang ekonomi materiil “. ¹

Bagi negara Republik Indonesia, peranan pemerintah didalam segenap aspek kehidupan masyarakat sangat menonjol. Namun demikian tidaklah dimaksudkan bahwa segala sesuatunya akan diurus oleh pemerintah. Peranan itu terutama ditujukan kepada pelaksanaan rangkaian usaha dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan. Oleh karena itu mulalah Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai titik sentral pelaksanaan otonomi, dan sekaligus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun pengembangan masyarakat di wilayahnya perlu mengadakan peningkatan

¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2004, hal. 17.